

DEWAKAWALAN PAKSIAT DI ERPAH REPUBLIKAN SIDAORJO

EDISI KAMIS, 29 DESEMBER 2022

RINGKASAN BERTA HARI INI

Bakal Tambah Posko Damkar di Sukodono

KOTA-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan berupaya untuk menambah unit lagi Posko Pemadam Kebakaran (Damkar).

Kepala BPBD Sidoarjo Dwjwo Prawdono mengungkapkan, kesadaran pemadam kebakaran perlu untuk meningkatkan jumlah posko itu akan ditempatkan di Kecamatan Sukodono. Saat ini BPBD juga telah menyusun perencanaan tentang penambahan posko.

"Tapi untuk pelaksanaan baru bisa pada 2024 nanti," terangnya.

Dwjo mengemukakan, kejadian kebakaran di Sukodono memang masih perlu menjadi perhatian. BPBD mencatat ada 194 kejadian kebakaran dari Januari-November 2022.

Kebakaran terbelak terjadi di lahan dengan total 96 kejadian. Jumlah kejadian di rumah warga 33 kejadian. Laju terbelaknya kebakaran yang terjadi di industri dan jasa sebanyak 30 kejadian.

Kegiatan kebakaran juga tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo. Terbelaknya di Kecamatan Krian dengan total ada 32 kejadian. Kemudian Kecamatan Wayu 22 kejadian dan Kecamatan Buduran 17 kejadian.

Sementara kejadian kebakaran paling kecil ada di Kecamatan Jabon. Sedangkan di Kecamatan Sukodono ada 8 kejadian kebakaran.

Menurut Dwjwo, penambahan Posko Damkar itu juga diharapkan bisa mempercepat respon time petugas damkar untuk menjangkau titik kebakaran. Saat ini belum semua kecamatan di Sidoarjo memiliki Posko Damkar. Posko Damkar baru ada di Kecamatan Porong, Krian, Candi, Buduran, Wayu dan Sidoarjo.

"Posko baru di Kecamatan Sukodono tentu akan semakin cepat untuk menjangkau jika ada kebakaran di kecamatan tersebut. Termasuk kecamatan sekitar seperti Taman maupun Wonorejo. Ataupun bantuan armada ke wilayah Krian," pungkasnya. (son/vga)

Banyak Stiker Hilang atau Dihilangkan

SIDAORJO - Banyak stiker yang hilang atau dihilangkan di berbagai lokasi di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat, terutama di kawasan industri dan perumahan.

Salah satu lokasi yang banyak ditemukan stiker hilang adalah di kawasan industri. Banyak stiker yang hilang di kawasan industri ini menimbulkan kecurigaan masyarakat, terutama di kawasan industri dan perumahan.

Salah satu lokasi yang banyak ditemukan stiker hilang adalah di kawasan industri. Banyak stiker yang hilang di kawasan industri ini menimbulkan kecurigaan masyarakat, terutama di kawasan industri dan perumahan.

Tahun 2023 Bangun SMPN 2 Prambon

Pembebasan lahan untuk pembangunan SMPN 2 Prambon sudah tunai semuanya. Rencananya, Januari mulai dilandak perencanaannya. Sementara itu, pelaksanaan lelang fisik sekitar triwulan kedua. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan SMPN 2 Prambon tahun depan sebesar Rp 7.573.500.000.

TIRTO ADI
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo

Pembangunan Puskesmas 97 Persen, Tahun Depan Siapkan Sarpras

KOTA-Menjelang akhir tahun, beberapa proyek pembangunan fisik Puskesmas 97 persen sudah selesai. Tahun depan disiapkan Sarpras.

KOTA-Menjelang akhir tahun, beberapa proyek pembangunan fisik Puskesmas 97 persen sudah selesai. Tahun depan disiapkan Sarpras.

LSM Satria Sayangkan Ada Pejabat Tutup Informasi Publik

Sidoarjo, Memorandum
Sulitnya media mendapat klarifikasi terkait dengan penyimpangan permainan proyek PL (penjualan langsung) di Dinas PUMMSA Sidoarjo, sangat mengherankan berbagai kalangan. Salah satunya LSM Satria.

Ketua LSM Satria Makin Suganda, menganyakan hal itu terjadi di era kepemimpinan Gus Mulhul-Subandi yang begitu terbuka kepada masyarakat.

"Bupati begitu terbuka. Wakil bupati juga terbuka. Mengapa pejabatnya justru tidak terbuka," ujar Makin Suganda, Rabu (28/12) di kantornya.

Menurut Makin Suganda, LSM dan pers adalah mitra kerja. Bukan musuh pejabat.

"Kedatangan rekan-rekan hanya untuk mengklarifikasi pelbagai macam persoalan yang perlu diuruskan dan mencari solusi untuk perbaikan," kata Makin.

Disebutkan Makin Suganda, pejabat tersebut kepala dinas atau kabag seharusnya lebih paham undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

"Jadi, tidak semestinya ada kepala SKPD yang berperilaku tidak menyenangkan dan menutup diri terhadap informasi untuk publik," bebarnya.

Seharusnya, lanjut Makin Suganda, di era kepemimpinan Gus Mulhul-Subandi, tidak ada kepala SKPD yang kaku terhadap aturan yang hendak dijalankan.

"Dan, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang mandul terhadap jalannya kegiatan," tandasnya. (yud/jok/mik)

Polisi Imbau Tokoh Agama Ajak Jemaah Jaga Kamtibmas

Sidoarjo, Memorandum
Demi tetap terciptanya situasi keamanan keributan masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Sidoarjo Kota, anggota Polsek Sidoarjo Kota, terus mengoptimalkan sambung tokoh agama (toga).

Seperti kegiatan safari salat berjamaah yang sekaligus digelar sebagai sarana silaturahmi dengan menyiapkan imbasan kamtibmas.

Tujuan utama diembulkannya kepedulian warga terhadap kamtibmas serta keselamatan warga di Masjid Baitul Huda, Desa Banjarbaru, Kecamatan Sidoarjo, Rabu (28/12).

Pada kegiatan tersebut, Kapolsek Sidoarjo Kota Kompol Komang Suganda, beserta landimbasan pengamanan, capaian 80 persen dari Proppempera yang ada. Kepada jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, ia mengingatkan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, dan bisa merugikan jemaah dan kegiatan tidak pidana percurian," ujar Komang.

Tahun ini, Kompol Komang juga menyempatkan isi-isi yang berkenaan melalui media yang sudah membuat reses sebagai sarana silaturahmi dengan menyiapkan imbasan kamtibmas.

Tujuan utama diembulkannya kepedulian warga terhadap kamtibmas serta keselamatan warga di Masjid Baitul Huda, Desa Banjarbaru, Kecamatan Sidoarjo, Rabu (28/12).

Ketua DPRD: Capaian Pembentukan Perda 80 Persen REFLEKSI AKHIR TAHUN 2022

SIDAORJO - Apa saja kinerja DPRD Sidoarjo selama Tahun 2022? Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, M.Kes saat briefing wartawan di rumah dinas mengatakan, DPRD-kan menjalankan 3 fungsi. Yakni, fungsi legislatif adalah membuat Perda (Peraturan Daerah).

"Dalam satu tahun kita sudah membuat Proppempera (Program Pembangunan Perencanaan Daerah) dan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) sebanyak 80 persen dari Proppempera yang ada. Kepada jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, ia mengingatkan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, dan bisa merugikan jemaah dan kegiatan tidak pidana percurian," ujar Komang.

Tahun ini, Kompol Komang juga menyempatkan isi-isi yang berkenaan melalui media yang sudah membuat reses sebagai sarana silaturahmi dengan menyiapkan imbasan kamtibmas.

Tujuan utama diembulkannya kepedulian warga terhadap kamtibmas serta keselamatan warga di Masjid Baitul Huda, Desa Banjarbaru, Kecamatan Sidoarjo, Rabu (28/12).

Berharap Kian Banyak Desa Berdaya Tahun Depan

SIDAORJO - Lima desa di Sidoarjo terpilih dalam program desa berdaya 2022 dari Pemprov Jatim. Selama setahun penuh mereka diberi dukungan pendampingan dan anggaran untuk mengoptimalkan potensi. Kemarin (28/12) Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengunjungi salah satunya, yakni Desa Klopo Sepuluh.

Dalam kesempatan itu, Subandi me-launching taman bermain, jogging track, dan sejumlah fasilitas lainnya di area lapangan Desa Klopo Sepuluh hasil pengembangan program desa berdaya.

"Sudah ada inisiatif dari gubernur agar program desa seperti ini terus dikembangkan. Tidak boleh lekas pendampingan," kata Subandi. Terutama dari pendampingan. Subandi menambahkan, "Jadi, tiap desa nanti punya ciri khas sesuai potensinya," ujar dia.

"Mereka jadi percontohan untuk pengembangan," imbuh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Mulyawan, Asisten 1 Sekda Pemkab Sidoarjo M. Anwar Rahaman menambahkan, desa berdaya ini merupakan bentuk apresiasi bagi desa dari Pemprov Jatim dengan bantuan keuangan khusus (BKX) masing-masing Rp 100 juta. Pengajuannya bergantung pada desas dengan tingkat agar desas memunculkan ciri khas.

"Misalnya, Klopo Sepuluh membangun desanya menjadi kawasan olahraga," ungkapnya. Ada jogging track, area bermain, dan lapangan yang bagus. Harapannya, tahun depan kian banyak yang bisa masuk dalam program desa berdaya tersebut. (uzd/cy/any)

Tahun Depan DP PMSDA Fokus Tangani Banjir di Uraa

KOTA-Penanganan banjir tahun ini dengan membangun rumah pompa di empat titik di kawasan Uraa, dan sekitarnya, beberapa titik masih terbelak dengan air," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaturan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPJUBMSDA) Sidoarjo Rian Anwar mengungkapkan, rencananya tahun depan salah satu upaya penanganan banjir juga akan dilakukan dengan membangun rumah pompa. Lokasi-nya di Desa Trogolo, Kecamatan Wunggalung, termasuk rumah pompa yang ada di Jalan Raya, dan satu unit lagi di kawasan Uraa.

Rian menyebutkan, dua rumah pompa tersebut dibangun untuk mengatasi banjir di lokasi yang sering terbelak.

Namun dengan memperhatikan wilayah yang berpotensial banjir tahun depan, seperti di kawasan Uraa, dan sekitarnya, beberapa titik masih terbelak dengan air," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaturan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPJUBMSDA) Sidoarjo Rian Anwar mengungkapkan, rencananya tahun depan salah satu upaya penanganan banjir juga akan dilakukan dengan membangun rumah pompa. Lokasi-nya di Desa Trogolo, Kecamatan Wunggalung, termasuk rumah pompa yang ada di Jalan Raya, dan satu unit lagi di kawasan Uraa.

Rian menyebutkan, dua rumah pompa tersebut dibangun untuk mengatasi banjir di lokasi yang sering terbelak.

Diperbanyak oleh Subag Pesidangan, Humas dan Rinsalah Sekretariat DPRD Sidoarjo

Sebelumnya, sekretariat DPRD Sidoarjo diperbanyak oleh Subag Pesidangan, Humas dan Rinsalah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan koordinasi dengan masyarakat.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2022

Ketua DPRD: Capaian Pembentukan Perda 80 Persen

SIDOARJO - Apa saja kinerja DPRD Sidoarjo selama Tahun 2022? Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, M.Kes saat bincang santai dengan wartawan Harian Duta Masyarakat Selasa malam (27/12) di rumah dinas mengatakan, DPRD akan menjalankan 3 fungsi. Yakni, fungsi legislasi adalah membuat Perda (Peraturan Daerah).

"Dalam satu tahun kita sudah membuat Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) di Tahun 2022. Dan kemarin paripurna terakhir Pimpinan DPRD kita sampaikan capaiannya 80 persen dari Propemperda yang ada. Kenapa tidak bisa 100 persen, banyak penyebab sehingga capaian tidak 100 persen. Karena Perda itu bersumber dari dua. Usulan eksekutif dan legislatif," jelas Usman.

Perda yang masuk, lanjut politisi PKB ini, dan yang diusulkan ke Bapemperda itu tidak selalu disertai naskah akademik. Jadi masih

usulannya. Karena naskah akademik sampai batas waktu belum ada. Maka, Perda yang diusulkan tidak bisa dibahas.

"Penyebab kedua kenapa capaian kok 80 persen dan capaian tidak 100 persen. Karena di PP (Peraturan Pemerintah) 12 Tahun 2018 serta tata tertib (tatib) DPRD, bahwa DPRD yang membahas Raperda itu dibahas di Panitia Khusus (Pansus). Ketentuannya Pansus yang sedang berjalan itu maksimal 4 disesuaikan dengan jumlah anggota komisi," ujarnya.

Jadi, tambah Usman, satu Pansus yang dibahas belum selesai. DPRD tidak bisa membentuk Pansus lagi. Harus menunggu selesai. Sedangkan Pansus yang berjalan harus 4 semua. "Lah itu diantaranya penyebab yang kedua," terangnya.

Yang ketiga, Raperda yang diusulkan dalam bentuk judul, itu belum selesai ditingkat Raperdanya. "Ya jadi itu yang terkait



KETUA DPRD Sidoarjo, H. Usman, M.Kes

Propemperda sesuai fungsi legislasi. Tapi fungsi legislasi sudah kita jalankan dan kita tahu mana yang menjadikan sebuah prioritas yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Yaitu Perda APBD wajib. Ada APBD murni ada APBD Perubahan," beber mantan Ketua

Komisi D ini.

Kedua Perda itu wajib dan harus diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. KUAPPAS, LPJ dan sebagainya itu selesai. Termasuk intruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang harus selesai tahun ini. Adalah Perda keuangan juga tentang Retribusi Pajak Daerah.

"Saya mengapresiasi anggota yang ada di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga tugas-tugas yang melekat dalam AKD itu bisa terselesaikan. Pengaduan masyarakat dan sebagainya. Itulah fungsi legislasi," paparnya.

Selanjutnya, kata Usman, fungsi penganggaran. "Kami telah melakukan rapat-rapat anggaran dengan Tim TAPD. Tentunya, itu juga dijalankan dengan baik tidak ada hambatan Kami juga menjalankan 17 prioritas program bupati setiap tahun. Jadi sinergitas dan disharmonisasi tidak ada ham-

batan untuk menjalankan fungsi budgeting kita," ucapnya.

Kemudian fungsi pengawasan atau kontroling, Usman mengatakan, masing-masing komisi melakukan pengawasan terhadap mitra kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing. Mulai dari Komisi A, B, C dan D. "Komisi C, pengawasan pembangunan melakukan progres pembangunan. Ini salah satu contoh," ujarnya.

Untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) menurut Usman, sudah melompat jauh. Saat ini sekitar 1,4 triliun. "Itu suatu lompatan yang luar biasa," tandasnya.

Berbincang mengenai uang APBD Sidoarjo yang berkisaran Rp 5 triliun. Apakah Tahun 2022 ini ada uang yang ngendon? Usman menampiknya, tidak ada uang ngendon. Bahkan ia menyampaikan keuangan sampai defisit. "Kita sampai kekurangan," pungkasnya. ● dar

DUTA

Tahun Depan DPUBMSDA Fokus Tangani Banjir di Utara



BAKAL DITAMBAH: Rumah pompa yang sudah dibangun untuk penanganan genangan tahun ini.

KOTA-Penanganan banjir tahun ini dengan membangun rumah pompa di empat titik diapresiasi oleh kalangan legislatif. Meski begitu, diharapkan tahun depan penanganannya bisa maksimal dan merata. Sebab tahun ini banyak berfokus di Sidoarjo selatan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko mengatakan, dengan adanya pembangunan rumah pompa di Desa Banjarasri, dan Penatarsewu, sangat membantu dalam mengatasi genangan di kawasan Tanggulangin. Termasuk rumah pompa yang ada di Jalan Raya Jati mampu menyedot genangan di kawasan tersebut.

Dia berharap ke depan upaya penanganan banjir itu bisa dilanjutkan.

Namun dengan memperhatikan wilayah yang berpotensi timbul genangan saat musim hujan. "Seperti di Waru dan sekitarnya, beberapa titik masih terlihat genangan air," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Rizal Asnan mengatakan, rencananya tahun depan salah satu upaya penanganan banjir juga akan dilakukan dengan membangun rumah pompa. Lokasinya di Desa Tropodo, Kecamatan Waru. Satu unit di dekat Pasar Wadungasri, dan satu unit lagi di sebelah jembatan cantel.

Rizal menyebutkan, dua rumah pompa tersebut dibangun untuk mengatasi genangan yang sering

terjadi di sekitar perumahan Tropodo. Nantinya pemkab juga akan membangun drainase baru di lingkungan tersebut. "Sehingga airnya langsung dialirkan ke Sungai Cantel," imbuhnya.

Kedua rumah pompa itu nantinya akan berkapasitas 1.400 liter per detik. Sama seperti rumah pompa yang dibangun di kawasan Tanggulangin. Pemkab menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk membangun dua rumah pompa tersebut.

Dengan adanya rumah pompa itu, diharapkan genangan yang terjadi di kawasan Waru bisa copot surut. Sehingga tidak mengganggu aktifitas warga. Sebab di kawasan tersebut cukup ramai dan volume lalu lintasnya tinggi. (nis/vga)



Banyak Stiker Hilang atau Dihilangkan



SALAH satu dari sekian mobil siaga desa yang stiker nama desa hilang atau dihilangkan. (28/12/22).

SIDOARJO - Banyak masyarakat mengeluhkan dan menyayangkan keberadaan mobil siaga desa di Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan warga desa terkadang tidak untuk peruntukannya. Banyak dijumpai tulisan nama desa dan kecamatan hilang atau sengaja dihilangkan. Mirisnya hal ini tidak ada tindakan maupun teguran dari dinas terkait maupun Camat setempat.

Seperti kerap dijumpai duta dilapangan mobil siaga desa tanpa striker dan terkadang nama desa dihilangkan. Padahal mobil siaga desa Suzuki APV diberikan Pemkab kepada desa, dana ditransfer langsung dari APBD ke kas desa itu berbentuk bantuan keuangan khusus. Seluruh desa sudah mendapatkan bantuan keuangan khusus.

Arief Nuryadin, SPd, SH, MM. Ketua divisi hukum Dan advokasi LSM Government Watch Nasional menegaskan, mobil siaga desa yang stickernya atau tulisan nama desa dan kecamatan dihilangkan sengaja itu tidak benar. Kalau hilangnya tidak sengaja pemdes harus memperbaiki. "Dan kalau disengaja perbuatan melawan hukum pelakunya bisa dikenai pasal penggelapan atau menggelapkan barang Negara. Mungkin itu upaya menghilangkan jejak agar mobil itu bisa digunakan secara pribadi dengan tujuan selain bukan urusan dinas (Pemdes)," tegas Arief.

Lanjut Arief, dampaknya operasional desa bisa terhambat/tidak lancar karena mobil sedang dipakai orang secara pribadi, atau mengatasnamakan desa untuk kepentingan pribadi padahal mobil milik negara setidaknya hanya boleh dipakai untuk urusan dinas. Karena masih banyak dijumpai mobil siaga desa ditemui ditempat wisata khususnya di daerah Trawas.

Harapannya harus ada pihak yang melakukan kontrol terhadap penggunaan mobil dinas pemdes, sehingga kedepan penggunaannya sesuai peruntukannya, tidak digunakan secara pribadi dengan alasan dinas dan bisa digunakan untuk masyarakat desa yang membutuhkan," pungkasnya

Senada salah satu warga Sidoarjo Dian(35), sangat di sayangkan dan pastinya merugikan warga desa. Bagaimana mobil desa yang seharusnya untuk fasilitas warga saat dibutuhkan, namun digunakan oknum untuk fasilitas pribadi tidak ada hubungannya dengan kebutuhan warga desa. Mobil tidak ada, karena dipakai ke tempat wisata maupun tempat lain ntah diluar jam kerja atau libur terutama terlebih sering saya jumpai di daerah Trawas dan Jolotundo.

"Semisal ada warga yang membutuhkan untuk fasilitas mengantarkan ke RS atau lainnya, tentunya menjadi hambatan, pastinya hal itu keluar jalur dan menjadi kan image mobil desa sudah bukan lagi menjadi prioritas kebutuhan warga desa," terangnya.

Sampai berita ini dimuat dinas terkait maupun beberapa Camat belum bisa dikonfirmasi karena tidak ada ditempat. Hal ini terkait hampir beberapa mobil desa di beberapa wilayah kecamatan di Sidoarjo stikernya banyak dijumpai hilang atau sengaja dihilangkan. • loe



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Tahun 2023 Bangun SMPN 2 Prambon



Pembebasan lahan untuk pembangunan SMPN 2 Prambon sudah tuntas semuanya. Rencananya, Januari mulai dilelang perencanaannya. Sementara itu, pelaksanaan lelang fisik sekitar triwulan kedua. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan SMPN 2 Prambon tahun depan sebesar Rp 7.573.500.000."

TIRTO ADI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo

Jawa Pos

Berharap Kian Banyak Desa Berdaya Tahun Depan

SIDOARJO - Lima desa di Sidoarjo terpilih dalam program desa berdaya 2022 dari Pemprov Jatim. Selama setahun penuh mereka diberi dukungan pendampingan dan anggaran untuk mengoptimalkan potensinya. Kemarin (28/12) Wakil Bupati Sidoarjo Subandi mengunjungi salah satunya, yakni Desa Klopo Sepuluh.

Dalam kesempatan itu, Subandi me-launching taman bermain, *jogging track*, dan sejumlah fasilitas lainnya di area lapangan Desa Klopo Sepuluh hasil pengembangan program desa berdaya.

"Sudah ada instruksi dari gubernur agar program desa seperti ini terus dikembangkan. Tidak boleh lepas pendampingannya," kata Subandi. Terutama dari pemda setempat. Subandi menyebutkan, pi-

LIMA DESA BERDAYA 2022 DI SIDOARJO VERSI PEMPROV JATIM

1. **Desa Simoketawang** dengan ikon Kampung Kelengkeng
2. **Desa Sugihwaras** dengan ikon TPST berbasis digital dan ecoenzim
3. **Desa Jaticalang** dengan ikon Wijaya Kusuma Cafe dan sport center
4. **Desa Klopo Sepuluh** dengan ikon lapangan desa bernama Pohon Jomblo
5. **Desa Kalisampurno** dengan ikon Resto Bali Sampurna

Sumber: DINAS PMD Sidoarjo

GRAFIS: RIZKY/JAWA POS

haknya akan melakukan pemetaan (*mapping*) potensi tiap desa. Baik potensi ekonomi, sosial, wisata, kuliner, dan lainnya. Potensi menonjol yang akan paling dikembangkan. "Jadi, tiap desa nanti punya

ciri khas sesuai potensinya," ujar dia.

"Mereka jadi percontohan untuk pengembangan," imbuh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Mulyawan.

Asisten I Setda Pemkab Sidoarjo M. Ainur Rahman menyatakan, desa berdaya merupakan bentuk apresiasi bagi desa dari Pemprov Jatim dengan bantuan keuangan khusus (BKK) masing-masing Rp 100 juta. Penggunaannya bergantung pada desa dengan tujuan agar desa memunculkan ciri khas.

"Misalnya, Klopo Sepuluh membangun desanya menjadi kawasan olahraga," ungkapnya. Ada *jogging track*, area bermain, dan lapangannya bagus. Harapannya, tahun depan kian banyak desa yang bisa masuk dalam program desa berdaya tersebut. (uzi/c9/any)

Jawa Pos

Akan Pindah Kantor, BBJT Raih ZI-WBK dari Kemen PAN-RB

SIDOARJO - Menjelang akhir tahun 2022, Balai Bahasa Jawa Timur (BBJT) meraih prestasi membanggakan. Mereka menjadi salah satu di antara tiga satuan kerja (satker) di bawah Kemendikbudristek yang memperoleh predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) 2022 dari Kementerian PAN-RB.

ZI-WBK adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya punya komitmen mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelay-



ANTUSIAS: Para undangan menyimak penjelasan Kepala BBJT Umi Kulsum dalam acara Taklimat Media: Capaian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di kantor BBJT, Sidoarjo, kemarin (28/12).

ayanan publik.

"Ini menjadi hadiah terbaik selama BBJT menempati kantor di Siwalanpanji, Buduran, Sido-

arjo," ujar Kepala BBJT Umi Kulsum dalam acara "Taklimat Media: Capaian Kinerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Tahun 2022" di kantornya kemarin (28/12).

Setelah 22 tahun berkantor di Sidoarjo, mulai awal Januari 2023

BBJT akan boyongan ke kantor baru di Gebang Putih, Sukolilo, Surabaya. Di tempat tugas yang baru nanti, BBJT berharap bisa kian meningkatkan inovasi-inovasi dalam mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia serta daerah dari yang telah dilakukan selama ini.

"Nanti akan kami sediakan juga ruangan khusus tempat berkegiatan dan berkumpulnya para sastrawan atau wartawan di kantor baru yang lebih besar," kata Umi menjawab pertanyaan dari Ribut Wijoto (sastrawan dan ketua umum Dewan Kesenian Sidoarjo) tentang harapan dan target pada 2023. (ir/c9/ris)

Jawa Pos

Pembangunan Puskesmas 97 Persen, Tahun Depan Siapkan Sarpras



CEK: Kepala Dinas Kesehatan Fenny Apridawati (kiri) saat melihat pembangunan Puskesmas Urangagung 2.

KOTA-Menjelang akhir tahun, beberapa proyek pembangunan fisik memasuki tahap finishing. Untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan selesai tepat waktu, Dinas Kesehatan (Dinkes) mendatangi beberapa proyek pembangunan puskesmas, Rabu (28/12).

Kepala Dinkes Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, pengecekan tersebut sebenarnya rutin dilakukan. Mulai dari pengerjaan awal hingga saat ini. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunannya berjalan sesuai dengan rencana.

Targetnya, akhir tahun ini seluruh pembangunan puskesmas sudah tuntas. Deadlinenya 31 Desember.

Dari hasil pengecekan, Fenny menyebutkan bahwa tidak ada kendala yang berarti selama masa pembangunan. "Semuanya dipastikan tuntas tepat waktu," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Sidoarjo, dr M Athoillah yang juga merupakan penanggung jawab pembangunan Puskesmas Urangagung 2 mengatakan, hingga saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 97 persen. Dia pun optimistis pada 31 Desember pembangunannya sudah selesai.

Selanjutnya, tinggal menyiapkan sarana dan prasarana untuk puskesmas

● Ke Halaman 10



Pembangunan Puskesmas...

tersebut. Nantinya akan menggunakan anggaran pada 2023. Mulai dari pemenuhan alat kesehatan, furnitur, dan lain sebagainya.

Atho menjelaskan, Puskesmas Urangagung 2 merupakan puskesmas non rawat inap. Sama dengan Puskesmas Urangagung 1. Namun dia memastikan bahwa luasnya lebih besar

dibandingkan Puskesmas Urangagung 1. "Sehingga bisa menampung lebih banyak warga yang berobat," ujarnya.

Sedangkan untuk pengisian Sumber Daya Manusia (SDM) serta tenaga kesehatan, juga akan dilakukan tahun depan. Atho menyebutkan, terkait kepe-

gawaian akan diisi dengan menggunakan sistem rotasi. Namun dia juga belum bisa memastikan hal tersebut. Sebab menurut dia hingga saat ini belum ada informasi terkait rekrutmen tenaga kerja di puskesmas tersebut.

Pada APBD 2023, Sidoarjo memang

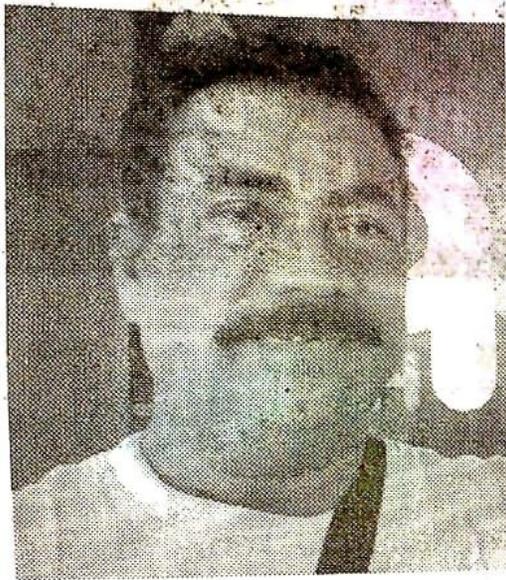
tidak ada anggaran untuk membangun fisik puskesmas. Anggarannya difokuskan untuk memenuhi sarana dan prasarana puskesmas yang sudah terbangun. Sehingga pada tahun depan puskesmas sudah bisa digunakan. (nis/vga)



LSM Satria Sayangkan Ada Pejabat Tutup Informasi Publik

Sidoarjo, Memorandum

Sulitnya media mendapat klarifikasi terkait dugaan penyimpangan permainan proyek PL (penunjukan langsung, red) di Dinas PUBMSDA Sidoarjo, sangat disayangkan berbagai kalangan. Salah satunya LSM Satria.



Makin Suganda

Ketua LSM Satria Makin Suganda, menyayangkan hal itu terjadi di era kepemimpinan Gus Muhdlor-Subandi yang begitu terbuka kepada masyarakat.

“Bupati begitu terbuka. Wakil bupati juga terbuka. Mengapa pejabatnya justru tidak terbuka,” ujar Makin Suganda, Rabu (28/12) di

kantornya.

Menurut Makin Suganda, LSM dan pers adalah mitra kerja. Bukan musuh pejabat.

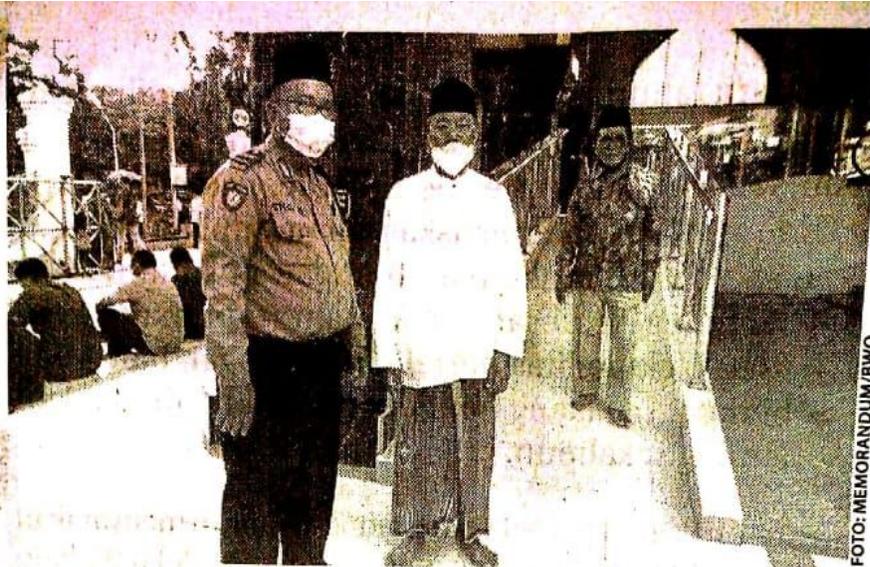
“Kedatangan rekan-rekan hanya untuk mengklarifikasi pelbagai macam persoalan yang perlu diluruskan dan mencari solusi untuk perbaikan,” jelas Makin.

Disebutkan Makin Suganda, pejabat setingkat kepala dinas atau kabag seharusnya lebih paham undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

“Jadi, tidak semestinya ada kepala SKPD yang berperilaku tidak menyenangkan dan menutup diri terhadap informasi untuk publik,” bebarnya.

Seharusnya, lanjut Makin Suganda, di era kepemimpinan Gus Muhdlor-Subandi, tidak ada lagi kepala SKPD yang kaku terhadap aturan yang hendak dijalankan.

“Dan, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang mandul terhadap jalannya kegiatan,” tandasnya. (yud/jok/mik)



Anggota Polsek Sidoarjo kota sambang tokoh agama.

Polisi Imbau Tokoh Agama Ajak Jemaah Jaga Kamtibmas

Sidoarjo, Memorandum

Demi tetap terciptanya situasi keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah Sidoarjo Kota, anggota Polsek Sidoarjo Kota, terus mengoptimalkan sambang tokoh agama (toga).

Seperti kegiatan safari salat berjemaah yang sekaligus dijadikan sebagai sarana silaturahmi dengan menyisipkan imbauan kamtibmas.

Tujuan untuk menumbuhkan kepedulian warga terhadap kamtibmas serta keselamatan warga di Masjid Baitul Huda, Desa Bajarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Rabu (28/12).

Pada kegiatan tersebut, Kapolsek Sidoarjo Kota Kompol I Komang Yuwandi Sastra beserta kanitbinmas menyampaikan, imbauan jemaah masjid tersebut agar memasang CCTV. Hal ini sebagai antisipasi adanya tindak pidana curas dan curanmor.

"Agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, dan bisa memantau jika ada kejadian tindak pidana pencurian," ujar I Komang.

Selain itu, Kompol I Komang juga menyisipkan isu-isu yang berkembang melalui medsos yang membuat resah sebagian warga. Melalui himbuan kamtibmas yang inten diberikan oleh Jajaran Polsek Sidoarjo Kota Polresta Sidoarjo diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada segenap warga.

"Tidak hanya itu, Kanit Binmas juga mengajak warga tersebut untuk menjaga lingkungan di wilayah masing-masing, supaya tetap aman dan kondusif kita harus tetap waspada dari kemungkinan timbulnya isu SARA yang timbul dari kelompok radikalisme yang berusaha memecah belah keutuhan NKRI," pungkasnya. (bwo/jok/mik)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lomba Deklamasi se-Jawa Timur

Suka Baca Puisi, Berhasil Raih Juara I Kategori Anak

Masih remaja, namun sudah panen prestasi. Setidaknya hal itulah yang tergambar pada sosok remaja bernama Dewi Kamilah Azzahra. Peraih Juara I Deklamasi Jawa Timur.

LUKMAN AL FARISI, Wartawan Radar Sidoarjo

SELAIN ahli memainkan Ventriloquism, remaja yang akrab disapa Zahra itu juga sangat pandai membawakan deklamasi. Sebuah penyajian sajak tanpa melihat teks yang disertai lagu dan gaya.

Remaja yang kini berusia 13 tahun tersebut berhasil menyisihkan 50 peserta dan masuk dalam 10 finalis deklamasi kategori anak se-Jawa

Timur. Hingga akhirnya berhasil merebut posisi pertama.

"Dari kecil memang suka membaca puisi. Nah, ini kan mirip puisi, tapi harus hafal teksnya. Ini sangat menantang sekali dan Alhamdulillah juara," ujar Zahra asal Sidoarjo tersebut.

Pada Ajang yang digelar di Balai Pemuda Surabaya tersebut, Zahra membawakan sajak karya

Akhudiat. Judulnya "Jangan Menangis Indonesia". Penampilan Zahra berhasil membuat dewan juri berdetak kagum.

Sajak yang dibawanya berhasil seirama dengan lagu dan gayanya. Setiap baik kata di dalamnya, begitu diresapinya. Seolah menyatu dengan kata. Uniknyanya lagi, Zahra selalu membawa identitas Sidoarjo.

"Saat tampil, dia selalu pakai Udheng khas Sidoarjo, Pacul Gowang. Itu sebagai identitasnya orang Sidoarjo," ujar Nur Rachmawati, ibunda Zahra. (far/vga)



Dewi Kamilah Azzahra





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO

TEKUN: Warga Sidoarjo mengikuti sertifikasi pelatihan kerja di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo.

Sebanyak 118,06 Ribu Penduduk Menganggur

KOTA-Sebanyak 118,06 ribu orang di Sidoarjo kini sedang menganggur. Itu berdasarkan publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo terkait kondisi ketenagakerjaan Sidoarjo 2022.

Kepala BPS Sidoarjo Indriya Purwaningsih mengungkapkan, angka tersebut sekaligus menunjukkan besaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sidoarjo yang ada di angka 8,80 persen. "Secara tren memang turun 2,07 persen dibanding 2021. Tapi TPT Sidoarjo masih tertinggi di Jawa Timur," jelasnya.

Indriya menambahkan, jika dirinci berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) merupakan tertinggi, yakni sebesar 23,80 persen. Kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10,14 persen, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 5,27 persen. Sedangkan TPT terendah adalah mereka yang telah menuntaskan pendidikan tinggi, yakni 2,35 persen.

Sementara itu, penduduk yang bekerja di Sidoarjo tercatat ada 1,22 juta orang. Angka itu meningkat sebanyak 149,83 ribu orang dibanding tahun lalu.

Kemudian penduduk yang bekerja di Sidoarjo jika dirinci didominasi bekerja di sektor jasa, yakni 62,30 persen. Lalu sektor manufaktur 35,85 persen dan sektor pertanian 1,85 persen.

Menurut Indriya, kondisi pengangguran di Sidoarjo tetap perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Secara tren memang menurun, tapi posisinya masih tertinggi di Jawa Timur.

Menurutnya, Pemerintah Daerah perlu merumuskan program yang tepat sasaran untuk bisa menuntaskan masalah pengangguran. "Butuh bersama-sama termasuk dengan pihak swasta untuk menuntaskan pengangguran," katanya.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu memahami pekerjaan apa yang diinginkan warganya. "Jadi bisa membuat program pelatihan sesuai yang diinginkan," pungkasnya. (son/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Bakal Tambah Posko Damkar di Sukodono

KOTA-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan berupaya untuk menambah satu lagi Posko Pemadam Kebakaran (Damkar).

Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito mengungkapkan, rencananya penambahan posko itu akan ditempatkan di Kecamatan Sukodono. Saat ini BPBD juga telah menyusun perencanaan teknis penambahan posko itu.

"Tapi untuk eksekusinya baru bisa pada 2024 nanti," terangnya.

Dwijo menguraikan, kejadian kebakaran di Sidoarjo memang masih perlu menjadi perhatian. BPBD mencatat ada 194 kejadian kebakaran dari Januari-November 2022.

Kebakaran terbanyak terjadi di lahan dengan total 96 kejadian. Kemudian kebakaran di rumah warga 31 kejadian. Lalu berikutnya kebakaran yang terjadi di industri dan jasa sebanyak 30 kejadian.

Kejadian kebakaran juga tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo. Terbanyak adalah Kecamatan Krian dengan total ada 32 kejadian. Kemudian Kecamatan Waru 22 kejadian dan Kecamatan Buduran 17 kejadian.

Sementara kejadian kebakaran paling kecil ada di Kecamatan Jabon. Sedangkan di Kecamatan Sukodono ada 8 kejadian kebakaran.

Menurut Dwijo, penambahan Posko Damkar itu juga diharapkan bisa mempercepat response time petugas damkar untuk menjangkau titik kebakaran. Saat ini belum semua Kecamatan di Sidoarjo tersedia Posko Damkar. Posko Damkar baru ada di Kecamatan Porong, Krian, Candi, Buduran, Waru dan Sidoarjo.

"Posko baru di Kecamatan Sukodono tentu akan semakin cepat untuk menjangkau jika ada kebakaran di kecamatan tersebut. Termasuk kecamatan sekitar seperti Taman maupun Wonoyu. Ataupun bantuan armada ke wilayah Krian," pungkasnya. (son/vga)